

**PENGENDALIAN KONFLIK PEDAGANG IKAN (FAGTER)
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN
(Studi pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang)**

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Meraih Gelar
Strata I (SI) Dalam Bidang Ilmu Sosial**



OLEH

FERA HASMITA

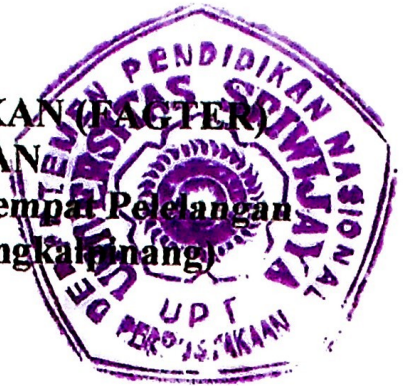
(07053102044)

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2010

S
303.604
Hus
P
e-10040
2010

**PENGENDALIAN KONFLIK PEDAGANG IKAN (FAGTER)
DI TEMPAT PELELANGAN IKAN
(Studi pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan
Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang)**



SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Meraih Gelar
Strata I (SI) Dalam Bidang Ilmu Sosial**



OLEH

FERA HASMITA

(07053102044)

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDRALAYA**

2010

LEMBAR PENGESAHAN

Pengendalian Konflik Pedagang Ikan (Fagter) di Tempat Pelelangan Ikan
(Studi Pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Sungai
Baturusa Kota Pangkalpinang)

Skripsi

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk mengikuti Ujian Komprehensif dalam
memenuhi sebagian persyaratan mencapai derajat Sarjana S1 Sosiologi pada Fakultas Ilmu
Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya

Diajukan Oleh :

FERA HASMITA

07053102044

Pembimbing I

Drs. Mulyanto, MA
NIP. 195611221983031002



Pembimbing II

Dra. Dyah Hapsari ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001



**PENGENDALIAN KONFLIK PEDAGANG IKAN (FAGTER) DI TEMPAT
PELELANGAN IKAN**

**(Studi pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan Ikan
(TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang)**

SKRIPSI

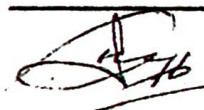
**Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya
dan Dinyatakan Berhasil Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
dari Syarat-syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Sosiologi
Pada Tanggal, 22 April 2010**

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


Drs. Mulyanto, MA
Ketua



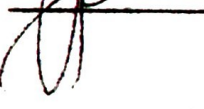
Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si
Anggota



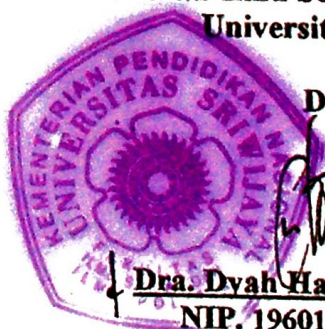
Dra. Rogaiyah, M.Si
Anggota



Dr. M. Husni Thamrin
Anggota



**Indralaya, April 2010
Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya**



Dekan,



Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si
NIP. 196010021992032001

...Motto dan Persembahan...

- “Hai Orang-orang yang beriman...
Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu,
Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar.....”
(Al Baqarah : 153)
- “Berusaha untuk terus memperbaiki diri dengan
mendekatkan diri pada hal-hal yang memperbaiki diri.....”
(Mario Teguh)

Kupersembahkan kepada :

1. ALLAH SWT, Sang Pencipta seluruh jagat raya dan Rasulullah Nabi Muhammad SAW
2. Kedua orang tuaku tercinta dan terkasih (Dani S dan Romaiti) yang selalu memberikan dukungan, doa dan nasihat yang tanpa henti
3. Keluarga besarku
4. Sahabat-sahabat dan teman-teman
5. Guru-guruku
6. Dosen FISIP UNSRI
7. Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Pengendalian Konflik Pedagang Ikan (Fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (Studi pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang)** ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna karena keterbatasan kemampuan dari penulis, namun sekiranya keterbatasan tersebut tidak mengurangi arti dan manfaatnya. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Badia Perizade, M.B.A. selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Ibu Dra. Dyah Hapsari, ENH, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan selaku Pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan masukan, bimbingan, semangat dan dukungan yang sangat bermanfaat. Terimakasih Bu.
3. Bapak Dr. Zulfikri Suleman, MA selaku Ketua Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Merri Yanti, S.Sos. M.Si selaku sekretaris Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Drs. Mulyanto, MA selaku Pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, nasihat, saran dan pengarahan serta pandangan-pandangan yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih Pak.
6. Bapak Drs. Tri Agus Susanto, M.S selaku Pembimbing Akademik.
7. Seluruh Dosen dan staff pegawai Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang banyak membantu selama masa perkuliahan di

Kampus FISIP UNSRI. Terimakasih tak terhingga atas semua ilmu, pengetahuan, dan pembelajaran yang Penulis dapatkan dari Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semuanya.

8. Guru TK Setia Utama, Guru SD Negeri 9 dan SD Negeri 28, Guru SMP Negeri 1 dan Guru SMA Negeri 1 Pangkalpinang. Terimakasih atas semua ilmu yang telah diberikan kepada penulis.
9. Penghargaan setinggi-tingginya penulis persembahkan pada orang tua tercinta, Dani S dan Romaiti, terima kasih atas dorongan, nasihat, motivasi dan bantuan baik moril maupun materil dengan kasih sayang dan do'a yang tiada hentinya yang tentunya sangat berarti dan menjadi kekuatan bagi penulis.
10. Saudaraku, Dody Nofiansyah, terimakasih atas doa dan dukungannya selama ini. Tetap semangat dalam meraih cita-citamu adikku tersayang.
11. Usu, Paksu, Mama, Papa, Bibi dan seluruh keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kalian adalah anugerah terindah yang Allah SWT berikan kepadaku.
12. Buat Kepala dan staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa dan fagter-fagter yang telah bersedia diwawancara dan sangat membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
13. Buat sahabat-sahabat seperjuanganku, Sri Juniarti, S.Sos dan Nopia. Tidak akan ada yang bisa menggantikan setiap kebersamaan kita. Terimakasih untuk segala yang telah tercurah baik itu suka maupun duka. Semoga semua yang kita khayalkan dan mimpikan bersama tercapai dengan penuh berkah...Amin.
14. Buat sahabat-sahabatku Siska Januarita, S.E, terimakasih untuk doa dan semangatnya; Yana, AMd, terimakasih untuk dukungannya selama ini; Mulyani Puji Akbari, terimakasih atas dorongan dan semangatnya, teruskan perjuangan kita sobat, impian itu pasti tercapai; Yenni Yanizar, ST, terimakasih atas segala pengalaman dan pelajaran serta dorongan semangat yang telah diberikan kepadaku.; Dewi Kartika Subekti, S.Pd; Dwi Anggraini, S. Pd dan untuk semua sahabatku yang lain, terimakasih!

15. Buat sahabat-sahabat lamaku, Echa, Ody, Dian, Nuri, Suci, Dewi.
16. Buat seluruh Dinavily's Crew, Alien, Renny, Jeany, Dyonk, Candra, Nina, Sari, Tiara, Etha dan lain-lain. Tidak ada tempat terindah di Indralaya kecuali di Dinavily. Semangat!!!!
17. Buat seluruh anggota ISBA Indralaya, terimakasih atas doa dan semangatnya.
18. Buat seluruh Senpai dan teman-teman di GOKASI Kota Pangkalpinang.
19. Buat teman-teman Sosiologi FISIP UNSRI angkatan 2005. Semoga kita semua sukses selalu. Amin.
20. Buat temen-temen KKS di PSMP Dharmaphala 2008: Adi, Rizky, Sri, Mela, Ambon, Defri dan Ken.
21. Buat semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah SWT mempermudah semua urusan kita. Amin. Terimakasih!

Akhirnya penulis berharap kiranya apa yang telah dicapai ini dapat memberikan manfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya Sosiologi. Penulis menyadari banyak keterbatasan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka dari itu penulis menyambut baik atas berbagai masukan dan saran sebagai perbaikan terhadap skripsi ini.

Indralaya, April 2010

Fera Hasmita

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pengendalian Konflik Pedagang Ikan (Fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (Studi pada Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)/Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang). Penelitian ini mengkaji mengenai faktor-faktor penyebab konflik antar pedagang ikan (fagter) dan bagaimana pengendalian konflik yang terjadi antar pedagang ikan (fagter) di Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggambarkan data deskriptif dari fenomena yang diteliti dengan unit analisis adalah individu yaitu para pedagang ikan (fagter) yang menjadi peserta lelang/juru lelang dan pejabat lelang yaitu kepala serta staf pelelangan di UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Dalam penentuan informan digunakan *purposive* dengan prinsip *snowball* yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendetail sesuai dengan permasalahan. Subyek penelitian dipilih 10 orang informan yang terdiri dari 5 orang pedagang ikan (fagter) dan 5 orang staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persaingan dagang di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa yang berpotensi menimbulkan konflik adalah persaingan harga dan persaingan tempat pelelangan ikan. Solusi yang diberikan dalam mengendalikan persaingan harga antara fagter tetap dengan fagter musiman yakni menyarankan fagter musiman untuk menitipkan barang dagangan mereka ke fagter tetap dengan sistem bagi hasil sedangkan solusi dalam mengendalikan penempatan pelataran parkir sebagai tempat untuk melelang ikan adalah dengan memindahkan fagter-fagter yang melelang ikan di pelataran parkir ke pelataran TPI yang baru serta solusi yang diberikan dalam mengendalikan persaingan penempatan pelataran TPI yang baru adalah dengan melakukan pengundian nomor untuk mendapatkan tempat di pelataran TPI yang baru.

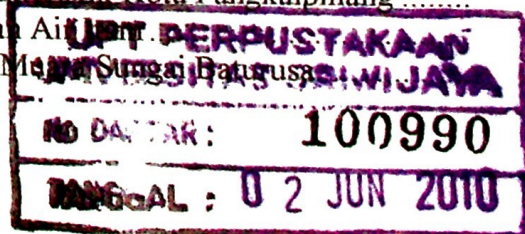
Hasil dari solusi pengendalian persaingan harga hingga saat ini masih dijalankan. Sebagian besar fagter musiman, tetap menitipkan barang dagangan mereka ke fagter tetap, walaupun masih ada beberapa fagter yang tidak mentaatinya sedangkan hasil dari solusi pengendalian penempatan pelataran parkir sebagai tempat untuk melelang ikan dan pengendalian persaingan penempatan pelataran TPI yang baru hingga saat ini belum bisa diketahui karena upaya tersebut belum benar-benar dilakukan karena pelataran TPI yang baru belum resmi digunakan untuk kegiatan pelelangan ikan.

Kata Kunci : Pengendalian Konflik, Fagter, Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL
LEMBAR PENGESAHAN
MOTTO DAN PERSEMBAHAN
KATA PENGANTAR
ABSTRAK
DAFTAR ISI
DAFTAR TABEL
DAFTAR BAGAN

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Tujuan Penelitian	8
1.4. Manfaat Penelitian	9
1.4.1. Manfaat Teoritis	9
1.4.2. Manfaat Praktis	9
1.5. Tinjauan Pustaka	9
1.5.1. Pendekatan terhadap Konflik	9
1.5.2. Sistem Pelelangan Ikan	13
1.5.3. Penelitian-Penelitian yang Relevan	14
1.6. Metode Penelitian	26
1.6.1. Lokasi Penelitian	26
1.6.2. Sifat dan Jenis Penelitian	27
1.6.3. Definisi Konsep	28
1.6.4. Data dan Sumber Data	28
1.6.5. Unit Analisis	30
1.6.6. Informan	30
1.6.7. Teknik Pengumpulan Data	31
a. Wawancara Mendalam	31
b. Observasi	32
c. Dokumentasi	33
1.6.8. Teknik Analisis Data	33
1.7. Sistematika Penulisan	37
BAB II KERANGKA PEMIKIRAN	38
2.1. Pedagang dan Aktivitas Perdagangan Hasil Perikanan	38
2.2. Konflik	41
2.3. Pengendalian Konflik	43
BAB III DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN	48
3.1. Gambaran Umum dan Karakteristik Kota Pangkalpinang	48
3.2. Gambaran Umum Kelurahan Aie	50
3.3. Gambaran Umum PPI/TPI Merauke Sungai Batang	54



3.4. Deskripsi Informan Penelitian	58
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS DATA.....	63
4.1. Kondisi PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.....	63
4.1.1. Kondisi PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Sekarang	63
4.1.2. Fasilitas PPI/TPI Muara Sungai Baturusa.....	68
4.1.3. Jumlah Pedagang Ikan (Fagter).....	73
4.1.4. Faktor Pendorong dalam Melakukan Pelelangan Ikan	77
4.2. Persyaratan Peserta Lelang	82
4.3. Proses Pelelangan Ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa.....	83
4.3.1. Proses Persiapan Pelelangan Ikan.....	83
4.3.2. Sistem Pelelangan Ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa	92
4.3.3. Kendala dalam Proses Pelelangan Ikan	97
a. Kendala yang Dirasakan oleh Fagter	97
b. Kendala yang Dirasakan oleh Pejabat Pelelangan.....	99
4.4. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Konflik.....	105
4.4.1. Persaingan Harga	106
4.4.2. Persaingan Tempat Pelelangan.....	112
a. Penempatan Pelataran Parkir sebagai Tempat Pelelangan Ikan.....	112
b. Persaingan dalam Mendapatkan Tempat Strategis di Pelataran Pelelangan Ikan Terbaru	119
4.5. Pengendalian Konflik	123
4.5.1. Upaya dalam Mengendalikan Persaingan Harga.....	123
4.5.2. Upaya dalam Mengendalikan Persaingan Tempat Pelelangan	127
a. Upaya dalam Mengendalikan Persaingan Penempatan Pelataran Parkir sebagai Tempat Pelelangan Ikan.....	127
b. Upaya dalam Mengendalikan Persaingan dalam Mendapatkan Tempat di Pelataran Pelelangan Ikan Terbaru	131
4.5.3. Kompromi dan Diskusi dalam Usaha Mengendalikan Konflik	134
4.5.4. Hasil dari Upaya Mengendalikan Persaingan Harga	137
4.5.5. Hasil dari Upaya Mengendalikan Persaingan Tempat Pelelangan	140
BAB V PENUTUP	143
5.1 Kesimpulan	143
5.2 Saran.....	144

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Kecamatan dan Kelurahan serta Luas Wilayah Kota Pangkalpinang.....	49
Tabel 3.2	Jumlah Penduduk, Luas Daerah dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2007 (s/d Bulan Mei 2007).....	50
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang.....	51
Tabel 3.4	Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang	51
Tabel 3.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang	52
Tabel 3.6	Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang	53
Tabel 3.7	Pegawai UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.....	57
Tabel 3.8	Pedagang Ikan (Fagter) di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.....	58
Tabel 3.9	Karakteristik Informan.....	62

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Alur Kerangka Pemikiran.....	47
--	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Undang-undang no 27 tahun 2000 merupakan provinsi ke-31 Republik Indonesia. Pada tanggal 9 Februari 2001 Kota Pangkalpinang resmi ditetapkan sebagai Ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Kota pangkalpinang merupakan salah satu daerah otonom yang letaknya di bagian timur pulau Bangka. Kota Pangkalpinang terdiri dari lima kecamatan yaitu Kecamatan Tamansari, Kecamatan Pangkalbalam, Kecamatan Rangkui, Kecamatan Bukit Intan dan Kecamatan Gerunggang (Elvian, dkk; 2006 : 1).

Salah satu fungsi kota Pangkalpinang adalah sebagai pusat perdagangan dan industri. Sebagai pusat perdagangan dan industri, kota Pangkalpinang mengalami kemajuan yang sangat pesat. Salah satu sektor yang cukup berperan menggiatkan perdagangan dan meningkatkan pendapatan penduduk adalah perikanan laut. Bila dilihat dari kegiatan penduduk maka kegiatan perikanan terbukti menjadi kontributor utama perekonomian daerah sejak tahun 1998 (<http://www.bpkp.go.id/>12 Juni 2009).

Potensi sektor kelautan dan perikanan Kota Pangkalpinang masih sangat potensial karena mempunyai wilayah penangkapan ikan atau Sumber Daya Ikan yang sangat baik pada perairan Laut Cina Selatan dan perairan Sumatera Selatan dan masih mempunyai prospek yang cukup cerah dalam pengembangannya

karena pemanfaatan dan pengolahan Sumber Daya Ikan pada kedua perairan tersebut belum optimal (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, 2007 : 9).

Keberhasilan pengembangan sektor perikanan di Kota Pangkalpinang tidak terlepas dari dukungan prasarana pendukungnya, dimana dalam hal ini adalah Pangkalan Pendaratan ikan (PPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. PPI Muara Sungai Baturusa ini merupakan bagian dari sistem perikanan tangkap secara keseluruhan, juga merupakan *interface* antara aktivitas perikanan di darat (pengolahan dan pemasaran) serta merupakan pusat segala aktifitas yang berhubungan dengan usaha penangkapan ikan dan usaha-usaha pendukung lainnya seperti usaha penyediaan bahan perbekalan, perkapalan, perbengkelan, pengolahan hasil tangkapan dan yang tak kalah pentingnya adalah Tempat Pelelangan Ikan (Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, 2007 : 94).

Saat ini, Kota Pangkalpinang memiliki satu tempat pelelangan ikan yang digunakan sebagai pusat tataniaga hasil perikanan khususnya hasil perikanan laut. Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa terletak di Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dekat muara sungai Baturusa dibangun pada masa Menteri Kelautan dan Perikanan masih dijabat oleh Ir. Sarwono Kusuma Atmadja, pada masa jabatan Walikota Pangkalpinang, Drs. H. Sofyan Rebuin, MM. Setelah berdiri bertahun-tahun tidak dimanfaatkan, Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara

Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang difungsikan lagi pada tanggal 1 Maret 2007 bersama dengan difungsikannya pemanfaatan P2HP (Pusat Pemasaran Pengolahan Hasil Perikanan) oleh Walikota Pangkalpinang, Drs. H. Zulkarnain Karim, MM. Difungsikannya TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang melalui tahapan yaitu pembangunan pasar ikan di tempat lama dan di TPI Pasir Putih, lalu TPI Pasir Putih pindah ke TPI Muara Sungai Baturusa (Elvian, dkk; 2009 : 75).

Sistem pelelangan dalam pelelangan ikan berbeda dengan sistem pelelangan biasa. Perbedaan tersebut sangat terlihat pada ciri khas ikan yang mudah rusak dan busuk sehingga dalam proses penjualannya, pedagang ikan (fagter) sebagai juru lelang seringkali membanting harga ikan agar ikan bisa terjual habis. Sistem penyimpanan ikan harus benar-benar diperhatikan. Pedagang ikan (fagter) di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang biasanya menggunakan es batu untuk membekukan ikan agar ikan tidak mudah busuk dan bisa bertahan dalam jangka waktu yang lama. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyimpanan ikan dengan tata cara yang benar agar ikan tidak mudah rusak. Penyediaan *cool box* di TPI dan pasar-pasar eceran merupakan keharusan. Para pedagang eceran harus menggunakan *cool box* untuk barang dagangannya.

Harga ikan biasanya tergantung pada jenis dan kualitas ikan, semakin bagus tingkat kesegaran ikan maka harga jual ikan akan semakin tinggi. Perbedaan harga ikan yang tidak jauh berbeda antar pedagang ikan (fagter) cenderung membuat kompetisi atau persaingan sesama pedagang ikan (fagter) semakin besar. Mereka harus bersaing dengan ketat dalam menjual ikan dagangan mereka agar bisa habis terjual.

Menurut Hanafiah dan Saefuddin (1986 : 6-8), berdasarkan pemilikan atas barang dagangan, pedagang dapat dibagi ke dalam dua kelompok, yaitu kelompok yang memiliki barang dagangan dan kelompok yang tidak memiliki barang dagangan. Kelompok yang memiliki barang dagangan adalah mereka yang membeli dan menjual barang dengan maksud memperoleh laba dan keharusan memikul resiko. Kelompok yang termasuk memiliki barang dagangan adalah pedagang pengumpul (tengkulak, bakul atau fagter), grosir (*wholesaler*), eksportir, importir dan pedagang eceran. Kelompok yang tidak memiliki barang dagangan adalah mereka yang hanya melaksanakan beberapa fungsi tataniaga tertentu dengan memperoleh upah sebagai balas jasa atas pelaksanaan fungsi tersebut; mereka ini disebut dengan “agen” atau pedagang perantara fungsional. Mereka ini membeli atau menjual barang dagangan atas nama atau untuk orang lain yang disebut *principals* yaitu pedagang yang mempergunakan agen untuk membeli barang untuk sendiri atau menjual barangnya kepada orang lain. Komisioner, makelar dan juru lelang adalah pedagang yang tidak memiliki barang.

Terjadinya penyimpangan dari tujuan sistem pelelangan yang sebenarnya, seringkali menyebabkan terjadi persaingan dan perselisihan yang memicu terjadinya konflik antar peserta lelang/juru lelang. Pedagang ikan (fagter) yang menjadi peserta lelang/juru lelang berusaha untuk bisa menjual ikan dengan harga yang tidak merugikan mereka sehingga dalam proses pelelangan sering terjadi persaingan. Persaingan tersebut bisa saja mengarah kepada persaingan yang tidak

sehat dan apabila tidak dikendalikan dari awal, hal tersebut akan menimbulkan suatu konflik yang lebih besar.

Persaingan dalam produksi, distribusi dan konsumsi dari barang dan jasa yang langka merupakan suatu bentuk khusus dari konflik. Intensitas persaingan sangat tergantung pada tingkat kelangkaan. Semakin langka suatu barang atau jasa maka semakin intens persaingan (Damsar, 2002 : 91).

Pengertian persaingan menurut Abdul Syani (1992 : 3), merupakan suatu usaha dari seseorang untuk mencapai sesuatu yang lebih daripada yang lainnya. Persaingan biasanya bersifat individu, apabila hasil dari persaingan itu dianggap cukup untuk memenuhi kepentingan pribadi. Akan tetapi, apabila hasilnya dianggap tidak mencukupi bagi seseorang, maka persaingan bisa terjadi antar kelompok, yaitu antara satu kelompok kerjasama dengan kelompok kerjasama yang lainnya. Dengan kata lain, bahwa terjadinya persaingan oleh karena ada perasaan atau anggapan seseorang bahwa ia akan lebih beruntung jika tidak bekerjasama dengan orang lain karena orang lain dianggap dapat memperkecil hasil suatu kerja. Persaingan dibedakan menjadi dua macam yaitu (1) Persaingan pribadi adalah persaingan yang berlangsung antara individu dengan individu atau individu dengan kelompok secara langsung dan (2) Persaingan kelompok adalah persaingan yang berlangsung antara kelompok dengan kelompok.

Persaingan bisa lebih tajam karena dapat dipastikan bahwa kelompok yang dipandang “lemah” tidak akan menerima posisi demikian dengan “berlipat tangan” atau paling sedikit akan mengambil langkah-langkah tertentu guna

mengakhiri, atau mungkin mengurangi, keunggulan kelompok yang kuat (Siagian, 2004 : 183).

Di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa terdapat dua macam pedagang ikan (fagter) yaitu fagter tetap dan fagter musiman (fagter ngos-ngosan). Fagter tetap adalah pedagang ikan (fagter) yang menjadi peserta tetap dan rutin melakukan aktivitas jualbeli ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa sedangkan fagter musiman (fagter ngos-ngosan) adalah pedagang ikan (fagter) yang hanya melakukan aktivitas jualbeli ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa pada waktu-waktu tertentu saja (tidak rutin).

Persaingan yang tidak sehat bisa mengarah kepada kecurangan-kecurangan dalam proses pelelangan. Hal tersebut bisa menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertentangan antar sesama fagter tetap atau antar sesama fagter musiman, antara fagter tetap dengan fagter musiman, antara fagter tetap dengan tengkulak maupun antara fagter dengan pejabat lelang, yang pada akhirnya jika hal tersebut terus dibiarkan dan tidak dikendalikan sejak awal akan menyebabkan timbulnya konflik, baik konflik tersembunyi (*laten*) ataupun konflik yang nyata (*manifest*).

Persaingan antar pedagang ikan yang tidak sehat menyebabkan proses pelelangan menjadi tidak adil bagi sebagian peserta lelang terutama yang mempunyai modal kecil karena mereka kesulitan untuk mendapatkan dan menjual ikan dengan kualitas bagus dengan harga murah sehingga seringkali membuat mereka kecewa dan merasa tertekan. Pedagang yang mempunyai modal besar cenderung untuk memonopoli pembelian ikan. Kekecewaan tersebut bila dibiarkan terlalu lama juga bisa menjadi perselisihan dan timbulnya pertentangan

yang akan menjadi pemicu timbulnya konflik antar pedagang ikan. Persaingan tersebut perlu dikendalikan agar tidak mencuat dan menjadi konflik yang nyata dan meluas.

Diperlukannya suatu manajemen konflik yang tepat agar bisa meredam dan mengendalikan konflik yang terjadi agar tidak meluas menjadi konflik yang lebih besar. Menurut Ross (1993), manajemen konflik merupakan langkah-langkah yang diambil para pelaku atau pihak ketiga dalam rangka mengarahkan perselisihan ke arah hasil tertentu yang mungkin atau tidak mungkin menghasilkan suatu akhir berupa penyelesaian konflik dan mungkin atau tidak mungkin menghasilkan ketenangan, hal positif, kreatif, bermufakat, atau agresif ([http://jepits.wordpress.com/5 april 2009](http://jepits.wordpress.com/5%20april%202009)).

Peran pejabat lelang dalam memantau proses pelelangan ikan juga sangat diperlukan, khususnya dalam proses pengendalian terhadap persaingan yang tidak sehat atau kecurangan-kecurangan yang terjadi antar pedagang ikan (fagter) yang menjadi peserta lelang/juru lelang di TPI Muara Sungai Baturusa agar persaingan yang terjadi tidak menyebabkan perselisihan dan pertentangan yang pada akhirnya akan menimbulkan konflik baik antar sesama fagter tetap atau antar sesama fagter musiman, antara fagter tetap dengan fagter musiman, antara fagter tetap dengan tengkulak maupun antara fagter dengan pejabat lelang. Oleh karena itu, menarik untuk mengungkap tentang pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) di TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dan perlu juga diketahui bagaimana kondisi aktivitas pelelangan ikan ini berlangsung, apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik yang timbul antar pedagang ikan (fagter) dan bagaimana peran

dari pejabat lelang dalam mengendalikan konflik yang terjadi antar pedagang ikan (fagter) yang menjadi peserta lelang/juru lelang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antar pedagang ikan (fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang?
- b. Bagaimana pengendalian konflik yang terjadi antar pedagang ikan (fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik antar pedagang ikan (fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.
- b. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengendalian konflik yang terjadi antar pedagang ikan (fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dapat diambil, yakni:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau tambahan informasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya kepada jurusan Sosiologi.
- Penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan dan wawasan mengenai pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

1.4.2. Manfaat Praktis

- Memberikan sumbangan pemikiran secara praktis kepada mahasiswa khususnya mengenai pengendalian konflik antar pedagang ikan (fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
- Diharapkan nantinya ada yang melanjutkan dan yang mengembangkan berdasarkan permasalahan baru yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.5. Tinjauan Pustaka

1.5.1. Pendekatan terhadap Konflik

Pendekatan Konflik dibangun dalam rangka untuk menentang secara langsung terhadap pendekatan Fungsionalisme Struktural yang beranggapan bahwa masyarakat berada dalam kondisi statis atau tepatnya bergerak dalam kondisi keseimbangan sedangkan pendekatan Konflik melihat bahwa setiap elemen memberikan sumbangan terhadap disintegrasi sosial. Dalam pendekatan

Konflik, masyarakat senantiasa berada dalam proses perubahan yang ditandai oleh pertentangan yang terus menerus di antara unsur-unsurnya (Ritzer, 2007 : 25-26).

Konflik pada dasarnya merupakan suatu dari berbagai bentuk perwujudan masalah sosial yang dialami oleh individu atau kelompok dalam berhubungan dengan individu atau kelompok yang lainnya. Masalah sosial pada dasarnya adalah suatu kenyataan sosial yang produktif yang ada dalam suatu masyarakat yang tidak dapat ditanggapi atau dipahami dengan menggunakan pengetahuan masyarakat yang bersangkutan (Rudito dan Famiola, 2008 : 211).

Konflik berasal dari kata kerja latin *configere* yang berarti saling memukul. Secara sosiologis, konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Konflik merupakan suatu situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya. Konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri (<http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik/22> Januari 2010). Oleh karena itu, konflik yang terjadi hanya dapat dikendalikan agar tidak terwujud dalam bentuk kekerasan atau *violence*.

Menurut Miall, Ramsbotham dan Woodhouse (2000 : 7), konflik adalah sebuah ekspresi heterogenitas kepentingan, nilai dan keyakinan yang muncul sebagai formasi baru yang ditimbulkan oleh perubahan sosial yang muncul bertentangan dengan hambatan yang diwariskan.

Robert C. North menyatakan, bahwa konflik pada dasarnya adalah segala macam interaksi pertentangan atau antagonis antara dua atau lebih pihak ([http://surveyburuh.webnode.com/24 Januari 2010](http://surveyburuh.webnode.com/24%20Januari%202010)).

Menurut Achmad Fedyani Syaifudin (1986 : 7) yang dikutip Said Gatara dan Dzulkiah Said (2007 : 183), konflik didefinisikan sebagai pertentangan yang bersifat langsung dan didasari antara individu-individu atau kelompok-kelompok untuk mencapai tujuan yang sama.

Sedangkan menurut Lewis A. Coser dalam Poloma (1994 : 108), konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial sekelilingnya.

Menurut Robbins (1996 : 430), konflik bila dilihat dari fungsinya dapat dibedakan menjadi:

- a. Konflik Fungsional (*Functional Conflict*) adalah konflik yang mendukung pencapaian tujuan kelompok, dan memperbaiki kinerja kelompok.
- b. Konflik Disfungsional (*Dysfunctional Conflict*) adalah konflik yang merintangi pencapaian tujuan kelompok ([http://publik.brawijaya.ac.id/11 April 2009](http://publik.brawijaya.ac.id/11%20April%202009)).

Berdasarkan pihak-pihak yang terlibat di dalam konflik, Stoner dan Freeman (1989 : 393) membagi konflik menjadi enam macam, yaitu:

- a. Konflik dalam diri individu (*conflict within the individual*). Konflik ini terjadi jika seseorang harus memilih tujuan yang saling bertentangan, atau karena tuntutan tugas yang melebihi batas kemampuannya.

- b. Konflik antar-individu (*conflict among individuals*). Terjadi karena perbedaan kepribadian (*personality differences*) antara individu yang satu dengan individu yang lain.
- c. Konflik antara individu dan kelompok (*conflict among individuals and groups*). Terjadi jika individu gagal menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok tempat ia bekerja.
- d. Konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama (*conflict among groups in the same organization*). Konflik ini terjadi karena masing-masing kelompok memiliki tujuan yang berbeda dan masing-masing berupaya untuk mencapainya.
- e. Konflik antar organisasi (*conflict among organizations*). Konflik ini terjadi jika tindakan yang dilakukan oleh organisasi menimbulkan dampak negatif bagi organisasi lainnya. Misalnya, dalam perebutan sumberdaya yang sama.
- f. Konflik antar individu dalam organisasi yang berbeda (*conflict among individuals in different organizations*). Konflik ini terjadi sebagai akibat sikap atau perilaku dari anggota suatu organisasi yang berdampak negatif bagi anggota organisasi yang lain (<http://publik.brawijaya.ac.id/11> April 2009).

Menurut Talcott Parsons, konflik terjadi karena benturan-benturan kepentingan (perebutan status, kekuasaan dan materi) dari para aktor yang ada. Konflik selalu hadir dan melekat pada kehidupan sosial, oleh karena itu, konflik perlu dimaknai secara bijak (<http://users2.titanichost.com/23> Juni 2009).

Konflik dapat menjadi masalah yang serius dalam setiap kelompok, tanpa peduli apapun bentuk dan tingkat kompleksitas kelompok tersebut. Konflik tersebut mungkin tidak menghancurkan kelompok secara langsung, tetapi pasti dapat menurunkan hubungan anggota dalam kelompok yang bersangkutan, jika konflik tersebut dibiarkan berlarut-larut tanpa penyelesaian. Sukses tidaknya konflik yang dihadapi pada dasarnya sangat bergantung pada seberapa besar perhatian pihak-pihak yang terlibat dalam mempertimbangkan sumber dari konflik itu sendiri. Dengan mempertimbangkan sumber konflik maka strategi

yang akan diambil dapat dilaksanakan. Hal ini dimungkinkan karena masing-masing sumber konflik memberikan strategi yang berbeda dalam penyelesaiannya.

1.5.2. Sistem Pelelangan Ikan

Pelelangan ikan adalah suatu kegiatan disuatu tempat pelelangan ikan guna mempertemukan antara penjual dan pembeli ikan sehingga terjadi tawar-menawar harga ikan yang mereka sepakati bersama. Dengan demikian pelelangan ikan adalah salah satu mata rantai tata niaga ikan (<http://tumoutou.net/23> Januari 2009).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan per kapita nelayan, maka pemerintah berkewajiban membina atau mengembangkan sistem pelelangan pada setiap tempat pelelangan ikan yang sudah ada sehingga tujuan dari sistem pelelangan yang sesungguhnya dapat tercapai. Menurut UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, pemerintah mengatur usaha perikanan dan mengatur tentang pengelolaan perikanan serta melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Tujuan pengelolaan perikanan oleh pemerintah adalah (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudi daya ikan kecil; (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara; (3) mendorong perluasan dan kesempatan kerja; (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan; (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan; (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah dan daya saing; (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku industri untuk pengolahan ikan; (8) mencapai pemanfaatan sumber daya ikan,

lahan pembudidayaan ikan dan lingkungan sumber daya ikan secara optimal; (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang (<http://www.bpkp.go.id/>12 Juni 2009).

Tujuan sesungguhnya dari sistem pelelangan di daerah produksi adalah mencari pembeli potensial untuk membeli sebanyak mungkin ikan hasil tangkapan nelayan pada tingkat harga yang menguntungkan nelayan tanpa merugikan pedagang pengumpul. Harga ikan di pasar pelelangan banyak dipengaruhi oleh pedagang pengumpul sebagai pembeli (Hanafiah, 1986 : 195).

Sistem penawaran yang berlaku di pelelangan adalah sistem bertingkat. Sistem bertingkat dalam sistem pelelangan yaitu harga yang ditawarkan terus meningkat sampai hanya ada satu pedagang yang sanggup membayar dengan harga tertinggi (pemenang lelang). Proses pelelangan ikan ini harus berlangsung pada pagi atau sore hari untuk menghindari suhu lingkungan yang terlalu tinggi yang bisa menyebabkan ikan mudah rusak.

1.5.3. Penelitian-penelitian yang Relevan dengan Penelitian Ini

Belum banyak tulisan yang mengungkap tentang pengendalian konflik pedagang ikan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI), khususnya di TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang karena TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang belum lama berdiri. Namun di bawah ini adalah penelitian-penelitian yang berkaitan dengan sistem pemasaran hasil perikanan dan konflik yang terjadi dalam proses penangkapan dan perdagangan perikanan khususnya dalam pelelangan ikan di tempat pelelangan ikan.

Hendi Koeshandoko meneliti tentang “Kajian Sistem Pemasaran dan Keterpaduan Pasar Ikan Laut Segar di Pangkalan Pendaratan Ikan Bojomulyo-Juwana Kabupaten Pati” dengan tujuan (1) melakukan analisis sistem pemasaran komoditas ikan laut segar yang didaratkan di PPI Bojomulyo; (2) melakukan analisis distribusi margin pemasaran dan efisiensi pemasaran komoditas ikan laut segar yang didaratkan di PPI Bojomulyo; (3) melakukan analisis korelasi harga dan keterpaduan pasar antara PPI Bojomulyo dengan pasar ikan di Jakarta, Semarang dan Magelang; dan (4) memberikan saran bagi perbaikan sistem pemasaran ikan laut segar yang lebih menguntungkan nelayan.

Dari penelitian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa:

- (1) Struktur pasar yang terbentuk pada pemasaran ikan laut segar di PPI Bojomulyo adalah persaingan oligopsoni, yang ditandai oleh adanya sejumlah besar nelayan sebagai produsen berhadapan dengan sejumlah kecil bakul ikan sebagai pembeli. Meskipun sistem penjualan ikan dilakukan melalui pelelangan, namun konsentrasi rasio pembelian oleh bakul ikan sebagian besar (64%) dikuasai oleh bakul ikan segar skala besar yang berjumlah 12 orang.
- (2) Jumlah lembaga pemasaran yang terlibat dalam sistem pemasaran ikan dari PPI Bojomulyo adalah 8 lembaga yaitu tempat pelelangan ikan (TPI), bakul pengolah, bakul bangkel, bakul ikan segar, pedagang grosir, pedagang sub grosir, institutional market, dan pedagang pengecer.
- (3) Terdapat 5 pola saluran pemasaran ikan laut segar di PPI Bojomulyo yaitu: Nelayan-TPI-bakul pengolah-industri pengolahan; Nelayan-TPI-

bakul ikan segar-eksportir; Nelayan-TPI-bakul ikan segar-pedagang grosir-institutional market; Nelayan-TPI-bakul ikan segar-pedagang grosir-institutional market-pedagang sub grosir dalam/luar kota-pedagang pengecer-konsumen; Nelayan-TPI-bakul bangkel-pedagang pengecer-konsumen.

- (4) Total nilai marjin pemasaran untuk ikan tongkol adalah Rp. 5.250,- per kg atau 46,67%; ikan kembung Rp. 3.500,- per kg atau 31,58%; dan ikan tenggiri Rp. 6.000,- per kg atau 43,75%. Sedangkan nilai bagian yang diterima nelayan (Fisherman's share) dalam pemasaran ikan laut segar dari PPI Bojomulyo untuk masing-masing jenis ikan adalah : ikan tongkol 53,33%, ikan kembung 56,35%, dan ikan tenggiri 68,42%.
- (5) Sebagian besar ikan laut segar dari PPI Bojomulyo dikirim ke Jakarta karena daya tarik harga yang lebih tinggi serta faktor daya serap pasar yang besar, namun hasil analisis korelasi harga dengan metode Pearson menunjukkan bahwa tidak ada korelasi harga ikan antara pasar PPI Bojomulyo dengan Pusat Pemasaran Ikan Muara Baru Jakarta. Kondisi ini diduga karena data yang digunakan adalah data harga rata-rata bulanan akibat ketiadaan data rata-rata harian sehingga menyebabkan kurang akurasinya perhitungan.
- (6) Hasil analisis keterpaduan pasar antara PPI Bojomulyo sebagai pasar lokal dan Kota Semarang dan Kota Magelang sebagai pasar acuan menunjukkan bahwa tidak terdapat keterpaduan pasar antara PPI Bojomulyo dengan Kota Magelang maupun Kota Semarang baik untuk

ikan tongkol, ikan kembung maupun ikan tenggiri. Penggunaan data rata-rata bulanan akibat ketiadaan data rata-rata harian diduga merupakan salah satu penyebab kurang akurasi perhitungannya.

- (7) Sistem pemasaran ikan laut segar dari PPI Bojomulyo termasuk sudah efisien meskipun memiliki rantai distribusi yang panjang dan lembaga pemasaran yang terlibat cukup banyak, namun telah mampu memberikan nilai fisherman's share lebih dari 50% (<http://elibrary.mb.ipb.ac.id/> 20 Mei 2009).

Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H; Aan Eko Widiarto, S.H., M.Hum dan Faizin Sulistio, S.H. meneliti tentang “Konflik Nelayan di Pantai Puger”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konflik nelayan yang terjadi baik horisontal maupun vertikal di Pantai Puger Kabupaten Jember; pranata atau norma-norma sosial yang selama ini berlaku di masyarakat nelayan Pantai Puger Kabupaten Jember dalam menyelesaikan konflik; mekanisme penyelesaian konflik nelayan baik horisontal maupun vertikal di Pantai Puger Kabupaten Jember.

Di dalam penelitian ini banyak hal yang menjadi penyebab terjadinya konflik nelayan di Pantai Puger yaitu (1) nelayan tidak masuk TPI sehingga tidak membayar retribusi di TPI serta menjual ikan sembarangan; (2) perebutan daerah tangkap yang disebabkan paceklik yang berkepanjangan sehingga banyak nelayan yang beralih profesi ke sektor pertanian; (3) dominasi tengkulak/pengambek yang menyebabkan ketergantungan ekonomi nelayan seperti jeratan utang dan tidak bisa masuknya pedagang luar untuk bersaing secara sehat sehingga menyebabkan

rendahnya harga ikan; (4) pengambek dengan tengkulak luar atau pedagang luar tidak bisa secara bebas membeli hasil laut karena harus membeli melalui pedagang lokal; (5) nelayan tidak mau membayar retribusi; (6) antar nelayan terkait perusakan laut, digunakannya alat tangkap bom dan kompresor dalam mencari ikan sehingga merusak alam laut; (7) nelayan menganggap aparat tidak serius menangani perusak laut karena banyaknya perusak laut yang tidak diproses; (8) tidak adanya transparansi hasil retribusi yang dilakukan Pemkab sehingga membuat masyarakat melakukan protes terhadap hal tersebut; (9) salah paham antar nelayan ketika di laut sehingga menimbulkan perkecokan dan pengrusakan; (10) kecelakaan di laut dari tahun 2003-2007; (11) antar nelayan terkait rumpon sehingga berebut rumpon bantuan; (12) nelayan sekoci merasa dianak-tirikan karena seringkali ada bantuan yang tidak diberitahu sehingga pemanfaatan dan pembagian bantuan tidak adil yang menyebabkan nelayan sekoci tidak mau membayar retribusi selama tiga bulan; (13) nelayan jaring dan payang menganggap bahwa keberadaan nelayan sekoci dengan rumponnya menyebabkan ikan tidak mau menepi ke pantai sehingga nelayan jaring dan payang merasa dirugikan; (14) nelayan kurang merasakan manfaat peran pemerintah.

Dari hasil penelitian bisa disimpulkan bahwa:

- (1) Konflik yang terjadi di masyarakat nelayan Puger berbentuk horisontal dan vertikal dengan sifat konflik berupa konflik laten dan manifest;
- (2) Mekanisme penyelesaian konflik di masyarakat nelayan Puger sangat dipengaruhi oleh norma-norma sosial yang hidup di dalamnya yakni

norma agama/kepercayaan dan kesusilaan. Norma yang berasal dari kepercayaan atau agama yang hidup dalam masyarakat;

- (3) Macam norma tersebut berasal dari keyakinan/kepercayaan masyarakat Puger maupun norma kesusilaan yang hidup dalam masyarakat setempat (<http://sociolegal.org/>29 Mei 2009).

Penelitian yang berkaitan dengan hal-hal yang menyebabkan terjadinya konflik dalam aktivitas perdagangan perikanan adalah penelitian yang dilakukan oleh **Kusnadi** (2003) yang berjudul “Konflik Sosial Nelayan” dan “Akar Kemiskinan Nelayan”. Dalam buku Konflik Sosial Nelayan ini dijelaskan mengenai sebab-sebab munculnya konflik nelayan di pulau Jawa termasuk di Cilacap. Pada tahun 1998 di Cilacap terjadi kerusuhan nelayan di TPI PPNC yang dipicu oleh beroperasinya kapal-kapal dari Bagan Siapi-api yang lebih modern peralatan tangkapnya, hal ini menimbulkan kecemburuan nelayan Cilacap, karena sejak beroperasinya kapal-kapal dari Bagan Siapi-api ini hasil tangkapan nelayan turun. Hal ini menunjukkan kesenjangan sosial-ekonomi nelayan antara nelayan Cilacap dengan nelayan Bagan Siapi-api. Sedangkan buku “Antar Kemiskinan Nelayan” berisi mengenai sebab-sebab kemiskinan nelayan dan peran pelelangan ikan dalam pengentasan kemiskinan nelayan (<http://digilib.unnes.ac.id/>17 April 2009).

Salah satu sumber lain yang menulis tentang konflik perikanan adalah karya **Achmad Zamroni** (Prosiding Seminar, Indikator Kinerja dan Hasil Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan, 2005: 72-80) tentang ”Konflik Perikanan Tangkap *Arad* pada Masyarakat Nelayan di Kecamatan Jepara Jawa

Tengah” Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik penggunaan alat tangkap *arad*, cara masyarakat nelayan dalam menyelesaikan konflik tersebut dan keterlibatan *stakeholder* dalam menyelesaikan konflik.

Pemecahan konflik yang dilakukan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu penyelesaian konflik yang terjadi pada nelayan Ujung Batu dan Bandung Harjo dengan melakukan beberapa langkah yaitu dilakukan rapat koordinasi masyarakat nelayan Ujung Batu yang menghasilkan beberapa keputusan, setelah itu dilakukan lagi pertemuan di ruang rapat I Setda Kabupaten Jepara yang juga menghasilkan beberapa kesepakatan serta pada akhirnya istri dari korban yang meninggal bersedia menerima santunan. Penyelesaian konflik yang lain adalah tentang pengoperasian *arad*, saat penelitian ini berlangsung, pengoperasian alat tangkap *arad* masih dilakukan oleh sebagian nelayan. Untuk menghindari konflik sejenis, maka seharusnya dilakukan pencegahan (*preventif*) dengan menggunakan dua skenario yaitu membatasi pengoperasian *arad* dan melarang secara tegas penggunaan *arad*.

Dari hasil penelitian tersebut disimpulkan bahwa:

- (1) Faktor-faktor yang menyebabkan konflik penggunaan alat tangkap *arad* di Kecamatan Jepara adalah berkaitan dengan; penggunaan alat tangkap yang dilarang, pelanggaran daerah pengangkapan (*fishing ground*), sedangkan konflik sifatnya "*laten*" berkaitan dengan pembinaan pemerintah terhadap nelayan, perbedaan teknologi penangkapan, proses

pelelangan di TPI dan kerjasama atau koordinasi antara pemerintah dan KUD.

- (2) Selain itu, penyelesaian konflik yang pernah terjadi yang dilakukan oleh masyarakat dengan perundingan atau *islah* (perdamaian) dengan melibatkan kelompok nelayan yang terlibat konflik, aparat desa dari nelayan yang terlibat konflik dengan sebagai fasilitator adalah Pemerintah Daerah Jepara sub Dinas Perikanan dan Kelautan dan Kepolisian.

Dari kesimpulan yang kedua diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat (*stakeholder*) dalam penyelesaian konflik dapat dikelompokkan menjadi; Dinas Perikanan dan Kepolisian Resort Jepara (dari unsur pemerintah), masyarakat yang terlibat konflik (dari unsur non-pemerintah).

Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu pada tahun 2009 melakukan suatu kajian tentang konflik yang terjadi antara serikat buruh dan manajemen dengan judul “Penyelesaian Konflik Melalui Negosiasi antara Serikat Buruh dan Manajemen”. Fokus kajian dalam tulisan ini adalah masalah konflik dengan segala aspeknya, bagaimana hidup bersama konflik dan bagaimana mengelola konflik untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positifnya bagi kepentingan organisasi, antara lain melalui teknik negosiasi dan mediasi.

Tulisan ini bertujuan untuk lebih meningkatkan pemahaman dan penguasaan para manager dalam memahami konflik; penyebab konflik; jenis-jenis konflik; tata cara mengelola konflik dengan benar, tepat dan cepat; mengelola

konflik melalui negosiasi dan mediasi; serta mengembangkan dan memanfaatkan konflik konstruktif untuk kepentingan organisasi.

Di dalam tulisan ini juga dipaparkan tentang satu contoh kasus yang berkaitan dengan konflik yang terjadi antara serikat buruh dengan organisasi yang mana dalam hal ini contoh organisasi tersebut adalah organisasi pendidikan (Organisasi X). Sekelompok karyawan muda yang tidak puas terhadap beberapa kebijakan kepegawaian dan didukung oleh sebuah partai politik tertentu yang berniat menanamkan pengaruh dalam ketiga perguruan tinggi milik organisasi tersebut, membentuk sebuah Serikat Pekerja (dalam tulisan ini disebut SP-A) di dalam organisasi tersebut. Mengantisipasi kemungkinan tersebut kemudian sekelompok karyawan senior yang mempunyai komitmen tinggi terhadap organisasinya membentuk sebuah Serikat Pekerja baru (dalam tulisan ini disebut SP-B).

Untuk menyelesaikan konflik antara Organisasi X, SP-A dengan SP-B telah dilakukan upaya-upaya penyelesaian konflik di antara ketiga pihak yang terlibat melalui negosiasi-negosiasi langsung, namun tidak membawa hasil, sehingga kemudian SP-A membawa permasalahannya kepada pihak ketiga (yaitu Departemen Tenaga Kerja) untuk bertindak sebagai mediator.

Melalui pendekatan-pendekatan intensif berdasarkan peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku oleh mediator kepada SP-A dan Organisasi X melalui pertemuan-pertemuan formal dan informal, diperoleh hasil sebagai berikut :

- (1) Pengurus dan anggota SP-A yang tetap bersikap keras satu persatu mengundurkan diri, sedangkan anggota-anggota yang masih ingin

bekerja di Organisasi X sebagian bergabung dengan SP-B dan sebagian kecil tetap di SP-A.

- (2) SP-B menjadi semakin eksis karena missinya yang searah dengan misi Organisasi X : bekerja sama dengan Organisasi X sebagai mitra untuk mensejahterakan karyawan melalui peningkatan produktivitas, serta strateginya yang tepat : rasional, persuasif dan koordinatif kepada SP-A, Organisasi X maupun Mediator.
- (3) Iklim kerja berangsur-angsur pulih dan lebih kondusif
- (4) Motivasi kerja kembali meningkat
- (5) Produktivitas karyawan dan institusi pendidikan meningkat
- (6) Peraturan kepegawaian dibakukan dalam bentuk Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sesuai dengan arahan dari Departemen Tenaga Kerja, sehingga ada kejelasan dan kepastian hukum yang dapat di pegang oleh Organisasi X maupun karyawan, SP-A dan SP-B.

Kesimpulan dari kajian yang dilakukan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu ini adalah :

1. Konflik terjadi apabila muncul interaksi pertentangan antagonistik antara dua pihak atau lebih. Konflik merupakan bagian tak terhindarkan dalam kehidupan organisasi modern, oleh sebab itu manajemen organisasi harus siap hidup bersama konflik, berlatih mengatasi konflik dan memanfaatkan konflik untuk mengakselerasi pencapaian tujuan organisasi.

2. *Functional atau constructive conflict* memberi manfaat untuk akselerasi pencapaian tujuan organisasi, oleh karenanya perlu distimulasi, sementara *dysfunctional atau destructive conflict* adalah kontra produktif, sehingga perlu diatasi sebaik-baiknya.
3. Salah satu cara penyelesaian konflik adalah negosiasi, yaitu suatu proses *take and give* di antara pihak-pihak yang terlibat konflik.
4. *Alternative Dispute Resolution (ADR)*, yaitu penyelesaian konflik secara informal melalui mediasi atau arbitrase, dapat ditempuh untuk menghindarkan penyelesaian konflik melalui pengadilan yang memakan waktu dan biaya besar.

Sedangkan hal-hal yang disarankan oleh Federasi Serikat Pekerja BUMN

Bersatu dalam kajian ini adalah :

- (1) Kepada manajemen organisasi disarankan untuk lebih memahami dan mendalami berbagai aspek yang menyangkut masalah konflik (pengertian dasar, penyebab, jenis-jenis konflik, cara mengatasi *destructive conflict* dan cara menstimulasikan *functional conflict*) sehingga lebih siap hidup bersama konflik dan lebih mampu memanej konflik.
- (2) Bagi organisasi yang jarang mengalami konflik disarankan untuk menstimulasikan *functional conflict*, baik melalui *devil's advocacy* maupun dengan *dialectic method*.
- (3) Penanganan konflik melalui negosiasi sebaiknya mengutamakan metode *intergrative negotiation* yang berbasis *win – win solution*, kecuali dalam

hal tertentu di mana posisi tawar (*bargaining position*) sangat kuat dan adanya keharusan memenangkan konflik, dapat ditempuh metode *distributive negotiation* dengan dasar *win – lose thinking*.

([http://surveyburuh.webnode.com/24 Januari 2010](http://surveyburuh.webnode.com/24%20Januari%202010)).

Penelitian lain yang dilakukan oleh **Dyah Hapsari (2002)**, yang berjudul "Pengendalian Konflik Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang (Studi tentang Penanganan Konflik antara Pedagang dengan Pemerintah Kota)". Tujuan dari penelitian ini yaitu mengetahui penanganan konflik yang terjadi antara pedagang kaki lima dengan pemerintah kota dan juga memahami pola penyelesaian konflik yang diambil oleh pemerintah kota dalam menertibkan pedagang kaki lima Kota Palembang.

Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa kasus konflik pedagang kaki lima tidak hanya melibatkan unsur pedagang dengan pemerintah namun terkait dengan kelompok preman yang sifatnya terselubung. Faktor-faktor yang menyebabkan konflik antara pedagang kaki lima dengan Pemerintah Kota Palembang adalah pemenuhan kebutuhan dasar pedagang kaki lima yang justru menimbulkan perebutan ruang perkotaan yang padat dan strategis sehingga dapat mengganggu program pemerintah itu sendiri. Selain itu, pengendalian konflik dilakukan dengan beberapa pendekatan yaitu pendekatan yuridis dan pendekatan kelembagaan.

Adapun kelebihan dari penelitian Dyah Hapsari adalah munculnya suatu pendekatan baru dari sisi pemerintah guna mencari suatu solusi dalam menangani konflik yang terjadi antara pedagang dengan pemerintah. Pendekatan ini menyangkut aspek yuridis dari sisi pemerintah mengenai pembenahan aturan

formal dan penegakan aturan secara lebih efektif. Sedangkan aspek yuridis dari sisi pedagang yaitu pembentukan forum bersama sebagai wahana musyawarah yang dimulai dari perencanaan sampai pengambilan keputusan agar aspirasi para pedagang terakomodasi dalam setiap kebijakan yang diambil pemerintah.

Berdasarkan penelitian di atas yang telah dilakukan sebelumnya, penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sebelumnya. Jika ditinjau kembali, belum banyak penelitian yang mengkaji tentang pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dalam penelitian ini, peneliti berusaha untuk mengetahui dan mengkaji tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya konflik antar pedagang ikan (fagter) dan juga ingin menjelaskan bagaimana pengendalian konflik yang terjadi antar pedagang ikan (fagter) di TPI dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang dideskripsikan berdasarkan hasil wawancara dengan informan, observasi dan dari data-data yang diperoleh di lapangan.

1.6. Metode Penelitian

1.6.1. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai Pengendalian Konflik antar Pedagang Ikan (fagter) di Tempat Pelelangan Ikan mengambil lokasi di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang. Suatu wilayah yang terletak tidak jauh dari pusat Kota Pangkalpinang. Alasan pemilihan lokasi ini karena PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang adalah satu-satunya PPI/TPI yang ada di Kota Pangkalpinang yang belum lama berdiri namun sudah berkembang dengan pesat

dimana sudah banyak pedagang ikan (fagter) yang melakukan kegiatan perdagangan di PPI/TPI tersebut yang pada setiap kegiatan pelelangan ikan yang dilakukan selalu ada persaingan di antara para pedagang ikan (fagter) yang bisa saja menyebabkan terjadinya konflik.

1.6.2. Sifat dan Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975 : 5) dalam Moleong (2005 : 4) mendefinisikan metode penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Penelitian dengan menggunakan format deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu (Bungin, 2007 : 68).

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti mencoba untuk memberikan gambaran tentang faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar pedagang ikan/fagter dan proses pengendalian konflik yang terjadi antar pedagang ikan (fagter) di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

1.6.3. Definisi Konsep

Konflik (pertentangan-perselisihan-percekcokan) adalah cara mencapai tujuan dengan melemahkan pihak lawan, tanpa menghiraukan norma dan nilai yang berlaku (Kartasapoetra dan Hartini, 2007 : 71).

Pengendalian konflik adalah suatu proses pengawasan atau pengendalian dari sebuah proses interaksi yang terjadi akibat adanya pertentangan, perselisihan dan ketidaksesuaian pendapat antara dua pihak atau lebih mengenai suatu hal yang menjadi tujuan atau kepentingan.

Menurut Soedjono Dirdjosis, **persaingan** adalah suatu kegiatan yang berupa perjuangan sosial untuk mencapai tujuan dengan bersaing terhadap yang lain, namun secara damai atau setidak-tidaknya tidak saling menjatuhkan (Abdul Syani, 1992).

Pedagang Ikan (Fagter) adalah orang atau kelompok nelayan atau pemilik ikan yang memperjualbelikan ikan melalui pelelangan ikan (Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2001).

Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat (Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2001).

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah tempat penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli ikan dengan melakukan pelelangan (Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2001).

1.6.4. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data diperoleh (Arikunto, 1997: 107). Menurut Lofland dan Lofland (1984 : 47) dalam Moleong



(2005 : 157) sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jenis datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto, dan statistik.

Data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua macam, meliputi :

➤ Data Primer

Data primer atau sumber data utama merupakan data yang diperoleh melalui proses wawancara, atau sejumlah kegiatan pengamatan melalui gabungan kegiatan, melihat, mendengar dan bertanya (Moleong, 2005).

Data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara. Data primer didapat dari informan yang menjadi subyek dalam penelitian ini yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi untuk mendeskripsikan fenomena penelitian mengenai pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

➤ Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang menunjang dalam penelitian ini yang diperoleh dari dokumen, arsip, maupun sejumlah buku referensi, koran, majalah, dan internet. Data-data sekunder dikumpulkan dari laporan-laporan yang dikeluarkan oleh PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang. Selain itu dikumpulkan literatur-literatur yang berkaitan dengan tata niaga ikan.

1.6.5. Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah individu yaitu para pedagang ikan (fagter) yang menjadi peserta lelang/juru lelang dan pejabat lelang yaitu kepala serta staf pelelangan di UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

1.6.6. Informan

Dalam penelitian kualitatif peneliti sangat erat kaitannya dengan faktor-faktor kontekstual. Jadi, penentuan informan dilakukan untuk menjangkau sebanyak mungkin informasi dari pelbagai macam sumber dan bangunannya (*constructions*). Dengan demikian tujuannya bukanlah memusatkan diri pada adanya perbedaan-perbedaan yang nantinya dikembangkan ke dalam generalisasi.

Tujuannya adalah untuk merinci kekhususan yang ada ke dalam ramuan konteks yang unik. Yang kedua adalah menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan teori yang muncul (Moleong, 1998 : 165).

Informan adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi ataupun fakta dari suatu objek penelitian (Bungin, 2007 : 108). Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive sampling* dan berprinsip *snowballing sampling* dengan tujuan untuk mendapatkan informasi sesuai dengan permasalahan penelitian (Bungin, 2007 : 77).

Ada 10 orang informan dalam penelitian mengenai pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang ini, yang terdiri dari 5 orang staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang yang merupakan pejabat lelang yang mengawasi dan

mengendalikan aktivitas pelelangan ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dan 5 orang pedagang ikan (fagter) yang merupakan peserta lelang/juru lelang yang melakukan aktivitas jualbeli ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

Kriteria dalam menentukan informan staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang adalah:

- Staf yang berwenang dalam mengawasi dan mengendalikan aktivitas pelelangan ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.
- Staf di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa yang bertugas sebagai juru catat dan juru tagih hasil dari penjualan ikan melalui lelang.
- Staf keamanan yang menjaga keamanan PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

Kriteria dalam menentukan informan pedagang ikan (fagter) adalah:

- Pedagang ikan (fagter) yang menjadi peserta tetap dalam aktivitas pelelangan ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.
- Pedagang ikan (fagter) musiman yang pada waktu tertentu melakukan aktivitas pelelangan ikan di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

1.6.7. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara Mendalam

Musta'in Mashud (Suyanto dkk, 2005 : 69) menyebutkan bahwa wawancara untuk keperluan penelitian berbeda dengan percakapan sehari-hari. Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian,

pendapat secara lisan dari seseorang (yang lazim disebut dengan *responden*) dengan berbicara langsung (*face to face*) dengan orang tersebut.

Menurut Bungin (2007 : 108), wawancara mendalam yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, di mana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.

Wawancara mendalam dalam penelitian ini dilakukan di tempat pelelangan ikan (TPI) pada saat para fagter melakukan aktivitas perdagangan ikan yang dilakukan pada pagi hari dan di Kantor UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa pada saat jam kerja staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa berlangsung. Peneliti menggunakan pedoman wawancara berstruktur yang telah dipersiapkan. Hal ini memungkinkan pihak yang di wawancarai mendefinisikan dirinya sendiri dan lingkungannya dengan menggunakan istilah-istilah mereka sendiri mengenai fenomena yang diteliti dan tidak sekedar menjawab pertanyaan. Maka dalam hal ini tujuan wawancara mendalam adalah untuk mendapatkan data primer.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja pancaindra mata serta dibantu dengan pancaindra lainnya. Dari pemahaman di atas, sesungguhnya yang dimaksud dengan metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan

pengindraan (Bungin, 2007 : 115). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengamatan sebagai pemeranserta yaitu peranan peneliti secara terbuka diketahui oleh umum (Moleong, 2005 : 177).

Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung ke lapangan atau lokasi penelitian, melihat secara langsung aktivitas yang dilakukan yang berhubungan dengan cara dan proses pelelangan ikan, interaksi antar fagter, interaksi antara fagter dengan staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa, peran staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa sebagai pejabat lelang dalam mengendalikan persaingan antar fagter yang bisa menjadi pemicu timbulnya konflik.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini dengan mempelajari sumber-sumber terkait, seperti buku-buku panduan yang berkaitan dengan fokus penelitian, misalnya buku-buku tentang konflik dan tata cara mengelola konflik, buku-buku tentang tataniaga dan teknik penanganan hasil perikanan, serta arsip-arsip pribadi subyek studi dan laporan penelitian yang sudah ada sehingga dapat menunjang pelaksanaan penelitian ini.

Peneliti mendapatkan data dokumentasi dari UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang sebagai Pengelola PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang, serta data-data lainnya dari buku penunjang dan website internet yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

1.6.8. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Sifat analisis deskriptif kualitatif bukan untuk mengeneralisasi dari

data-data yang didapat, tetapi hanya untuk menggambarkan varian-varian dalam kerangka holistik dari realitas sosial mengenai pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa. Analisis data dalam penelitian ini menurut Miles dan Habermas (1992), terdapat tiga tahap analisis data (Bungin, 2001 : 229) yaitu tahap reduksi data, tahap penyajian data, dan tahap kesimpulan. Ketiga tahap ini dapat dijelaskan sebagai berikut.

a. Tahap Reduksi Data

Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan dan pemusatan perhatian penelitian. Proses awal dimulai dengan menelaah seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan dan wawancara. Pada tahap ini, peneliti memusatkan dan memilih data yang diperoleh dari lapangan, yaitu data yang mendeskripsikan tentang adanya upaya pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) yang dilakukan oleh staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa sebagai pejabat lelang. Data yang dipilih disesuaikan dan data yang memiliki derajat relevansinya yang berkenaan dengan maksud penelitian.

Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya mereduksi data, yaitu pada tahap ini data yang terkumpul dan terekam dalam catatan lapangan dirangkum dan diseleksi. Kegiatan ini sekaligus juga merupakan proses penyusunan data ke dalam berbagai fokus, kategori atau pokok permasalahan yang sesuai. Data yang direduksi dalam penelitian ini adalah dari hasil pengamatan (data lapangan) yang meliputi kondisi, proses pelelangan ikan, interaksi dan perilaku para fagter yang bersaing dalam proses jual beli hasil

perikanan serta upaya yang telah dan akan dilakukan oleh staf atau pejabat lelang dalam menganggulangi terjadinya konflik yang luas antar fagter di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa. Data-data ini selanjutnya diseleksi serta dikategorisasikan berdasarkan fokus permasalahannya.

b. Tahap Penyajian Data (*display*)

Penyajian (*display*) data yaitu pada tahap ini data diolah dengan menyusun atau menyajikan ke dalam matriks-matriks atau teks naratif yang sesuai dengan keadaan data yang telah direduksi, yang akan memudahkan pengkontruksian data dan memudahkan mengetahui cakupan data yang terkumpul. Langkah ini dilakukan agar variasi-variasi yang ditemukan dalam penelitian ini akan tetap berada dalam konteks fokus penelitian dan tidak meluas di luar tema. Data yang diambil dari hasil pengamatan lapangan serta hasil pengamatan lapangan serta hasil wawancara dengan informan dan telah diolah melalui proses reduksi, penyusunan, diseleksi dan dikategorisasikan dalam bentuk *matriks-matriks* kemudian akan disajikan dalam bentuk cerita misalnya peneliti menceritakan tentang kondisi PPI/TPI Muara Sungai Baturusa, proses pelelangan ikan, faktor-faktor penyebab terjadinya konflik antar pedagang ikan (fagter) secara detail lengkap dengan gambaran latar alamiahnya, dan peneliti menceritakan mengenai upaya-upaya yang diambil oleh pejabat lelang (staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang) dalam mengendalikan konflik yang terjadi agar tidak menjadi konflik yang terbuka dan lebih besar.

Setelah pengelompokan data, data yang diperoleh dituliskan ke dalam tulisan uraian yang detail atau banyaknya disesuaikan dengan kebutuhan akan

jawaban dari pertanyaan penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini dituliskan dalam tiga bagian pada BAB IV, yaitu pengantar, uraian dari jawaban rumusan masalah yang pertama, dan uraian dari jawaban rumusan masalah yang kedua dengan tema mengenai pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.

c. Tahap Kesimpulan

Pada tahap ini, peneliti menarik kesimpulan dari reduksi data dan penyajian yang telah dilakukan sebelumnya. Penarikan kesimpulan bertujuan untuk memberikan gambaran singkat mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti. Pada tahap penyimpulan data akan diuraikan dengan kata-kata singkat yang penuh makna sehingga hasil penelitian mudah dimengerti.

Kesimpulan ditarik berdasarkan uraian data-data dari informan penelitian, dalam hal ini adalah pejabat lelang (staf UPT PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang) dan pedagang ikan (fagter), dengan tema yang berkaitan dengan judul penelitian. Kesimpulan yang dituliskan ini menggambarkan tentang hasil penelitian secara singkat dan padat, serta diharapkan dapat memudahkan pembaca dalam memahami inti dari penelitian ini.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- BAB I** Berisi Pendahuluan yang mengulas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan, manfaat, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II** Merupakan Kerangka Pemikiran yaitu mengulas teori-teori yang akan digunakan peneliti untuk menjelaskan fenomena-fenomena yang akan diteliti.
- BAB III** Berisi tentang Deskripsi Wilayah Penelitian menguraikan tentang Gambaran Umum dan Karakteristik Kota Pangkalpinang, Gambaran Umum Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Gambaran Umum PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang dan deskripsi informan penelitian.
- BAB IV** Berisi tentang Pembahasan dan Analisis Data yang menjelaskan tentang temuan-temuan di lapangan serta analisis sosiologis terhadap permasalahan penelitian yang mencakup faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik antar pedagang ikan (fagter) dan pengendalian konflik pedagang ikan (fagter) di PPI/TPI Muara Sungai Baturusa Kota Pangkalpinang.
- BAB V** Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsami. 1997. *Prosedur Penelitian (Edisi Revisi V)*. Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Kencana.
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah; Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Jakarta : Kemitraan.
- Damsar. 2002. *Sosiologi Ekonomi (Edisi Revisi)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.
- Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang. 2007. *Data Base Perikanan Tangkap Kota Pangkalpinang*. Pangkalpinang : Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Pangkalpinang.
- Elvian, Akhmad, dkk. 2006. *Sejarah dan Budaya Pangkalpinang, Kota Kemenangan*. Pangkalpinang : Bidang Kebudayaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang.
- , 2009. *Membangun Pangkalpinang Kita Semua*. Pangkalpinang: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pangkalpinang.
- Gatara, Said dan Dzulkiah Said. 2007. *Sosiologi Politik; Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*. Bandung : Pustaka Setia.
- Hanafiah, A. M. dan. A. M. Saefuddin. 1986. *Tata Niaga Hasil Perikanan*. Jakarta : Universitas Indonesia (UI-Press).
- Hapsari, Dyah. 2002. *Pengendalian Konflik Pedagang Kaki Lima di Kota Palembang (Studi tentang Penanganan Konflik antara Pedagang dengan Pemerintah Kota)*. Lembaga Penelitian Universitas Sriwijaya. Inderalaya.
- Hendricks, William. 1992. *Bagaimana Mengelola Konflik (Petunjuk Praktis untuk Manajemen Konflik yang Efektif)*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Huraerah, Abu dan Purwanto. 2006. *Dinamika Kelompok (Konsep dan Aplikasi)*. Bandung : Refika Aditama.
- Husni, Lalu. 2007. *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Pengadilan dan di Luar Pengadilan*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Johnson, Doyle Paul. 1994. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama.

Kartasapoetra, G dan Hartini. 2007. *Kamus Sosiologi dan Kependudukan*. Jakarta: Bumi Aksara.

Miall, Hugh, Oliver Ramsbotham dan Tom Woodhouse. 2000. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer (Menyelesaikan, Mengelola dan Mengubah Konflik Bersumber Politik, Sosial, Agama dan Ras)*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Moleong, Lexy J, MA. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

-----, 1998. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.

Oktarina, Enita. 2007. *Aktivitas Perdagangan Barang Ilegal pada Sektor Informal (Studi pada Pedagang "BJ" di Pasar Griya Musi Permai Perumnas Sako Palembang)*. Skripsi. Inderalaya: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya. (Skripsi yang tidak diterbitkan).

Perda Kota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2001. Pangkalpinang.

Poloma, Margaret M. 1994. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta : CV. Rajawali.

Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ritzer, George. 2007. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.

Rudito, Bambang dan Melia Famiola. 2008. *Social Mapping (Metode Pemetaan Sosial)*. Bandung : Rekayasa Sains.

Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Sidabutar, Sondang Irene E, dkk. 2003. *Pemulihan Psikososial Berbasis Komunitas*. Jakarta : KontraS dan Yayasan PULIH.

Soerjono, Soekanto. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali Pers.

Suyanto, dkk. 2005. *Metode Penelitian Sosial (Berbagai Alternatif Pendekatan)*. Jakarta : Kencana.

Syani, Abdul. 1992. *Sosiologi, Skematika, Teori dan Terapan*. Jakarta : Bumi Aksara.

Zamroni, Achmad. 2005. *Konflik Perikanan Tangkap Arad pada Masyarakat Nelayan di Kecamatan Jepara Jawa Tengah*. Jakarta : Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan.

Daftar Rujukan Elektronik

- Federasi Serikat Pekerja BUMN Bersatu. 2009. *Penyelesaian Konflik melalui Negosiasi antara Serikat Buruh dan Manajemen*. Dalam <http://surveyburuh.webnode.com>. Diakses 24 Januari 2010.
- Hakim, Abdul. 2007. *Diklat Manajemen Organisasi*. Dalam <http://publik.brawijaya.ac.id>. Diakses 11 April 2009.
- Koeshandoko, Hendi. 2006. *Kajian sistem pemasaran dan keterpaduan pasar ikan laut segar di pangkalan pendaratan ikan bojomulyo-juwana kabupaten pati*. Dalam <http://elibrary.mb.ipb.ac.id>. Diakses 20 Mei 2009.
- Mahyuddin, Bustami. 2001. *Makalah Falsafah Sains: Peranan Pelelangan Ikan dalam Meningkatkan Pendapatan Nelayan (Kasus Pelelangan Ikan Di Pelabuhan Perikanan Nusantara Pelabuhanratu)*. Dalam <http://tumoutou.net>. Diakses 23 Januari 2009.
- Navastara, Ardy Maulidy. 2007. *Manajemen Konflik: Definisi dan Teori-teori Konflik*. Dalam <http://jepits.wordpress.com>. Diakses 5 April 2009.
- Nurdayasakti, Setiawan, dkk. 2008. *Konflik Nelayan di Pantai Puger*. Dalam <http://sociolegal.org>. Diakses 29 Mei 2009.
- Sudiono, Mugi. 2005. *Pengaruh Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Cilacap Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi dan Sosial Budaya Masyarakat Nelayan Cilacap Tahun 1996-2000*. Dalam <http://digilib.unnes.ac.id>. Diakses 17 April 2009.
- Supriyanto. Juni, 2007. *Peta Potensi Konflik di Indonesia*. Dalam <http://users2.titanichost.com>. Diakses 23 Juni 2009.
- Thalib. 2004. *Manajemen Konflik*. Dalam <http://id.wikipedia.org/wiki/Konflik>. Diakses 22 Januari 2010.
- Undang-undang No.31 Tahun 2004. 2004. *Undang-undang No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan*. Dalam <http://www.bpkp.go.id>. Diakses 12 Juni 2009.